

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian

1. Kondisi Geografis



Sumber: BPS Banjarnegara

Gambar 2
Peta Kabupaten Banjarnegara

Secara Astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak diantara $7^{\circ}12'$ – $7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}20'$ - $109^{\circ}45'$ Bujur Timur. Luas wilayahnya seluas 106.970,997 Ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah Barat ke Timur. Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi:

- a. Bagian Utara, terdiri dari Daerah pegunungan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Karangobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, Banjarmangu dan Punggelan.
- b. Bagian Tengah, terdiri dari wilayah dengan relief datar merupakan lembah sungai Serayu yang subur, meliputi sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purworejo Kelampok, Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu.
- c. Bagian Selatan, terdiri dari wilayah dengan relief curam merupakan wilayah dari pegunungan Serayu meliputi Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purworejo Kelampok, dan Susukan.

2. Kondisi Administratif

Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Wonosobo.
- b. Sebelah Barat : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.
- c. Sebelah Utara : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

d. Sebelah Selatan : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Kebumen

3. Kependudukan dan Angkatan Kerja

Jumlah penduduk berdasar proyeksi pada tahun 2017 berjumlah 912.917 jiwa, dengan penduduk laki-laki berjumlah 457.295 jiwa dan penduduk perempuan 455.622 jiwa. Lebih spesifikasi lagi untuk jumlah penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 dibawah. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja Kabupaten Banjarnegara yang terakhir update pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Susukan	26,790	27,265
Purwareja Klampok	20,546	21,062
Mandiraja	32,310	32,941
Purwanegara	33,742	34,565
Bawang	27,789	27,898
Banjarnegara	34,201	33,909
Pagedongan	17,582	17,602
Sigaluh	15,702	15,111
Madukara	21,923	21,490
Banjarmangu	21,731	21,262
Wanadadi	14,483	14,781
Rakit	23,529	23,937
Punggelan	37,284	37,343
Karangkobar	15,301	14,772
Pagentan	18,271	17,847
Pejawaran	21,230	20,622
Batur	19,677	19,137
Wanayasa	24,010	22,954
Kalibening	21,043	20,974
Pandanarum	10,151	10,150
Total	457,295	455,622

*Jiwa

Sumber: BPS Banjarnegara

Tabel 4
Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Kabupaten Banjarnegara	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Total
2017	464,432	23,025	487,457

*Jiwa

Sumber: BPS Banjarnegara



Gambar 3
Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Dari gambar 2 di atas menjelaskan bahwa angkatan kerja Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 lebih banyak yang sudah bekerja daripada yang masih menganggur. Pada tabel 3 di atas menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 sebanyak 487,457 jiwa dengan jumlah yang sudah bekerja sebanyak 464,432 jiwa dan yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran sebanyak 23,025 jiwa.

B. Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Uji analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan jumlah data, nilai maksimum dan minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai simpangan baku (*standart deviation*) untuk variabel-variabel dalam penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat secara keseluruhan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 5
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penduduk (X1)	5	13.21	13.26	13.2341	.01607
Pajak Daerah (X2)	5	24.11	24.90	24.4156	.34512
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	5	16.22	16.43	16.3223	.08332
Belanja Daerah (X4)	5	27.79	28.41	28.1150	.26084
Pendapatan Asli Daerah (Y)	5	25.32	26.42	25.8846	.41334
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Output SPSS v.15.0

Pada tabel 5 di atas menyajikan variabel yang berjumlah 4 dan masing-masing sampel variabel berjumlah 5. Hasil uji di atas menggunakan aplikasi SPSS v.15.0 yang diolah oleh peneliti. Untuk jumlah penduduk (X1) memiliki nilai minimum sebesar 13.21, nilai maksimum sebesar 13.26, mean sebesar 13.2381 dan standart deviation sebesar 0.1587. Untuk variabel pajak daerah (X2) memiliki nilai minimum 24.11, nilai maksimum 24.90, mean sebesar 24.4156 dan nilai standart deviation sebesar 0.34512. Untuk variabel ke tiga pertumbuhan ekonomi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 16.22, nilai maksimum sebesar 16.43, nilai mean sebesar 16.3223 dan standart deviation sebesar 0.08332. Sedangkan untuk variabel terakhir yaitu belanja daerah (X4) memiliki nilai minimum sebesar 27.79, nilai maksimum 28.41, mean 28.1150 dan standart deviation sebesar 0.26084 dan variabel pendapatan asli daerah (Y) memiliki nilai minimum 25.32, nilai maksimum sebesar 26.42, mean sebesar 25.8846 dan nilai standar deviation sebesar 0.41334.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel:

a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Penduduk

Tabel 5.1
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Penduduk

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penduduk	5	13.21	13.26	13.2381	.01587

Sumber: Output SPSS v.15.0

Melihat dari tabel 5.1 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki sampel sebanyak 5 dengan nilai minimum sebesar 13.21, nilai maksimum sebesar 13.26, nilai mean 13.2381 dan standart deviation sebesar 0.01587.

b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Daerah

Tabel 5.2
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Daerah

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	5	24.11	24.90	24.4156	.34152

Sumber: Output SPSS v.15.0

Dari tabel 5.2 di atas menunjukkan untuk variabel pajak daerah memiliki sampel berjumlah 5 dengan nilai minimum 24.11, nilai maksimum 24.90, mean 24.4156 dan standart deviation sebesar 0.34152.

c. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5.3
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	5	16.22	16.43	16.3223	.08322

Sumber: Output SPSS v.15.0

Tabel 5.3 di atas menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki jumlah sampel 5 dengan nilai minimum sebesar 16.22, nilai maksimum 16.43, mean 16.3223 dan standart deviation sebesar 0.08322.

d. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Belanja Daerah

Tabel 5.4
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Belanja Daerah

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	5	27.79	28.41	28.1150	.206084

Sumber: Output SPSS v.15.0

Tabel 5.4 diatas menjelaskan bahwa variabel belanja daerah memiliki sampel berjumlah 5 dengan nilai minimum sebesar 27.79, nilai maksimum 28.41, mean 28.1150 dan standart deviation sebesar 0.206084.

e. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5.5
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	5	25.32	26.42	25.8846	.41334

Sumber: Output SPSS v.15.0

Tabel 5.5 di atas menjelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki jumlah sampel 5 dengan nilai minimum 25.32, nilai maksimum sebesar 26.42, mean sebesar 25.8846 dan nilai standar deviation sebesar 0.41334.

2. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji korelasi berganda bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris adanya korelasi antara 2 variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu jumlah penduduk, pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja daerah. Berikut uji korelasi yang tersaji pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6
Uji Korelasi

Correlations

		Jumlah Penduduk (X1)	Pajak Daerah (X2)	PDRB (X3)	Belanja Daerah (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
Jumlah	Pearson Correlation	1	.559	.748	.666	.743
Pendudu	Sig. (2-tailed)		.328	.146	.220	.150
k (X1)	N	5	5	5	5	5
Pajak	Pearson Correlation	.559	1	.911*	.905*	.932*
Daerah	Sig. (2-tailed)	.328		.031	.035	.021
(X2)	N	5	5	5	5	5
Pertumb	Pearson Correlation	.748	.911*	1	.992**	.960**
uhan	Sig. (2-tailed)	.146	.031		.001	.010
Ekonomi	N	5	5	5	5	5
(X3)						
Belanja	Pearson Correlation	.666	.905*	.992**	1	.942*
Daerah	Sig. (2-tailed)	.220	.035	.001		.017
(X4)	N	5	5	5	5	5
Pendapa	Pearson Correlation	.743	.932*	.960**	.942*	1
tan Asli	Sig. (2-tailed)	.150	.021	.010	.017	
Daerah	N	5	5	5	5	5
(Y)						

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Uji Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel jumlah penduduk dengan pajak daerah. Dari hasil uji korelasi pada tabel 6 diatas menunjukkan nilai *sig.(2-tailed)* sebesar 0.150 > alpha 0.05 dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.743 yang berarti tidak ada korelasi antara jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan tidak terdapat korelasi atau H1 **ditolak**.

b. Uji Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari hasil uji korelasi pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai *sig(2-tailed)* sebesar $0.021 < \alpha 0.05$ dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.932 yang dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berkorelasi dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi atau H2 **diterima**.

c. Uji Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 6 di atas variabel pada hipotesis 3 yaitu pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah memiliki nilai *sig(2-tailed)* sebesar $0.010 < \alpha 0.05$, dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.960 yang dapat diartikan terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi atau H3 **diterima**.

d. Uji Hipotesis 4

Berdasarkan pada tabel 6 di atas menunjukkan variabel belanja daerah dengan pendapatan asli daerah memiliki nilai *sig(2-tailed)* sebesar $0.017 < \alpha 0.05$, dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.942 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara belanja

daerah dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi atau H4 **diterima**.

C. Pembahasan (Interpretasi)

1. Korelasi Antara Jumlah Penduduk Dengan Pendapatan Asli

Daerah

Hasil hipotesis pertama (H_1), dengan melihat tabel 6 di atas, diketahui bahwa variabel jumlah penduduk tidak berkorelasi dengan pendapatan asli daerah dengan nilai *sig (2-tailed)* $0.150 > \alpha 0.05$. Artinya jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah tidak terdapat korelasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariasih, Utama, dan Wirathi (2011) yang mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah karena sebesar apapun jumlah penduduk dalam wilayah tersebut jika tidak ikut serta dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan cara patuh membayar pajak yang merupakan faktor utama dalam pendapatan asli daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci dan Yazid (2014), begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Vecky, dan Mauna (2016), dan Enjelina (2016) yang mendapatkan hasil signifikan positif.

Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk tenaga maupun pikirannya. Dalam kaitannya dengan pajak daerah, jumlah penduduk umur produktif yang sudah bekerja maupun berwirausaha sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Pajak

yang dapat dipungut melalui jumlah penduduk berupa pajak penghasilan bagi yang sudah memiliki pekerjaan atau wirausaha. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Kabupaten Banjarnegara masih kurang paham akan pentingnya pendapatan asli daerah yang di pungut oleh pemerintah daerah.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa tingginya jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah karena jumlah penduduk bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2. Korelasi Antara Pajak Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2), dengan melihat tabel 6 diatas diketahui bahwa variabel pajak daerah dengan pendapatan asli daerah berkorelasi signifikan positif, dengan nilai *sig (2-tailed)* sebesar $0.021 < \alpha 0.05$. Penelitian ini sejalan dengan Rochaida (2016), yang mendapatkan hasil pajak daerah dengan pendapatan asli daerah memiliki korelasi signifikan positif. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Dwi (2008), yang mendapatkan hasil signifikan positif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmattullah (2015) juga mendapatkan hasil signifikan positif antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin tingginya pajak yang diterima oleh

pemerintah daerah maka pendapatan asli daerah akan ikut meningkat seiring dengan meningkatnya pajak daerah. Pajak daerah dalam Kabupaten Banjarnegara tergolong tinggi karena memiliki wisata, sarang burung walet yang cukup banyak. Sedangkan pajak daerah yang cukup rendah diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu pajak kendaraan bermotor. Masih banyak warga yang tidak paham akan pentingnya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Hasil dari wawancara terhadap Pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa pajak daerah merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan tingginya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah pula. Pendapatan asli daerah tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kualitas wilayah dalam segi ekonomi.

3. Korelasi Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3), dengan melihat tabel 6 diatas, mendapatkan hasil variabel pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah memiliki korelasi signifikan positif dengan nilai *sig (2-tailed)* $0.010 < \alpha 0.05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devita, Arman dan Junaidi (2014), mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam periode yang berjalan. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh Irdha, Vecky dan Daisy (2010), juga mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah memiliki korelasi signifikan positif. Demikian juga dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sasana (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi signifikan positif dengan pendapatan asli daerah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka pertumbuhan ekonomi dalam periode berjalan akan meningkat pula. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan BPPKAD dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

4. Korelasi Antara Belanja Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yang dapat dilihat pada tabel 6 mendapatkan hasil nilai *sig (2-tailed)* sebesar $0.017 < \alpha 0.05$ yang memiliki arti bahwa belanja daerah memiliki korelasi signifikan positif dengan pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan Syukriy (2016) yang mendapatkan hasil belanja daerah memiliki hubungan signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Valencia dan Nur (2015), mendapatkan hasil belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh

Handayani, Syukriy, dan Heru (2015), yang mendapatkan hasil bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan hasil pengujian penelitian ini mendapatkan hasil bahwa belanja daerah berkorelasi signifikan positif dengan pendapatan asli. Hal tersebut dapat dikarenakan dengan meningkatnya belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk meningkatkan hasil bumi yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dengan maksimal. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa belanja daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemakmuran masyarakat dan peningkatan kualitas untuk pemungutan pendapatan asli daerah agar pendapatan asli daerah dapat meningkat secara signifikan.

5. Analisis Pendapatan Asli Daerah Menggunakan Metode *Value for Money (VFM)*

Pendapatan asli daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Metode *value for money* bertujuan untuk menganalisis apakah suatu pendapatan tersebut memenuhi kriteria 3E (efisien, ekonomis, dan efektif) yang berarti dalam memperoleh pendapatan tersebut secara efisien dan pemakainnya dapat secara efektif dan ekonomis. Kriteria tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

a. Tingkat Ekonomis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2013-2017

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pengeluaran Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7
Kriteria Ekonomis

Persentase Ekonomis	Kriteria Ekonomis
<90%	Sangat Ekonomis
90-95%	Ekonomis
96%-100%	Kurang Ekonomis
>100%	Tidak Ekonomis

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Dengan melihat kriteria pada tabel 6 diatas maka didapatkan perhitungan untuk tingkat ekonomis yang dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 7.1
Tingkat Ekonomis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran Daerah	Tingkat Ekonomis
2013	98.975.180.350	8.147.000.000	12%
2014	161.652.537.773	5.456.500.000	29%
2015	153.482.413.212	6.203.500.000	22%
2016	221.048.387.512	23.612.500.000	9,36%
2017	297.485.382.003	12.626.605.000	23,5%

*dalam rupiah

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

1. Tingkat Ekonomis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

$$\frac{98.975.180.350}{8.147.000.000} \times 100\% = 12\%$$

Dengan melihat kriteria diatas maka pendapatan asli daerah Banjarnegara tahun 2013 dapat dikategorikan sangat ekonomis dikarenakan persentase dari perhitungannya mendapatkan hasil 12%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah lebih tinggi daripada pengeluaran daerah yang menggunakan dana dari pendapatan asli daerah tersebut.

2. Tingkat Ekonomis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

$$\frac{161.652.537.773}{5.456.500.000} \times 100\% = 29\%$$

Dengan melihat kriteria diatas maka pendapatan asli daerah Banjarnegara tahun 2014 dapat dikategorikan sangat ekonomis karena memiliki nilai perhitungan sebesar 29%. Hal tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah lebih besar dari pengeluaran pemerintah daerah.

3. Tingkat Ekonomis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015

$$\frac{142.628.201.000}{6.203.500.000} \times 100\% = 22\%$$

Dengan melihat perhitungan diatas, tingkat ekonomis pendapatan asli daerah Banjarnegara pada tahun 2015 dapat

dikategorikan sangat ekonomis dengan nilai perhitungan 29%.

4. Tingkat Ekonomis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

$$\frac{221.048.387.512}{23.612.500.000} \times 100\% = 9.36\%$$

Dengan melihat perhitungan diatas, tingkat ekonomis pendapatan asli daerah pada tahun 2016 dikategorikan sangat ekonomis dengan nilai perhitungan 9.36%.

5. Tingkat Ekonois Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

$$\frac{297.485.382.003}{12.626.605.000} \times 100\% = 23.5\%$$

Dengan melihat perhitungan diatas, tingkat ekonomis pendapatan asli daerah pada tahun 2017 dapat dikategorikan sangat ekonomis dengan nilai perhitungan 23.5%.

**b. Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2013 - 2017**

$$\text{Tingkat efisien} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pengeluaran Transfer}} \times 100\%$$

**Tabel 8
Kriteria Efisien**

Persentase Efisien	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
71%-100%	Kurang Efisien
50%-70%	Cukup Efisien
21%-49%	Efisien
<20%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Dengan melihat kriteria pada tabel 8 diatas maka didapatkan perhitungan untuk tingkat efisien pada tabel 8.1 dibawah ini:

**Tabel 8.1
Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2013-2017**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran Transfer	Tingkat Efisiensi
2013	98.975.180.350	1.415.716.234	69%
2014	161.652.537.773	1.530.927.373	10%
2015	153.482.413.212	3.865.528.375	30%
2016	221.048.387.512	4.958.044.000	44%
2017	297.485.382.003	5.262.859.000	56%

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

1. Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banjarnegara 2013

Dengan melihat tabel 8.1 diatas pada tahun 2013 tingkat efisien pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 mendapat hasil perhitungan sebesar 69%. Dari hasil tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat cukup efisien.

2. Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

Dari hasil perhitungan yang tertera pada tabel 8.1 diatas untuk tingkat efisien pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 memiliki hasil perhitungan sebesar 10%. Hasil perhitungan tersebut dapat memasuki kategori sangat efisien.

3. Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015

Pada tabel 8.1 diatas untuk tingkat efisien pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015 mendapatkan hasil perhitungan sebesar 30%. Jika dilihat pada kriteria tingkat efisien maka pada tahun 2015 pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara memasuki kategori efisien.

4. Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

Pada tahun 2016 tingkat efisien yang dapat dilihat pada tabel 8 memiliki hasil persentase sebesar 44%. Jika dilihat melalui kategori yang terdapat pada tabel 8.1 maka memasuki kategori efisien.

5. Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Pada tahun 2017 tingkat efisien pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara memasuki kategori cukup efisien dengan nilai persentase 56% yang dapat dilihat pada tabel 8.1 diatas.

c. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017

$$\text{Tingkat efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 9
Kriteria Efektifitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
<20%	Tidak Efektif
21%-49%	Kurang Efektif
50%-79%	Cukup Efektif
80-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Dengan melihat kriteria tabel 9 diatas maka didapatkan hasil perhitungan dalam tabel 9.1 dibawah ini:

Tabel 9.1
Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Efektivitas
2013	98.975.180.350	88.557.495.000	111%
2014	161.652.537.773	127.171.027.100	127%
2015	153.482.413.212	133.023.527.100	115%
2016	221.048.387.512	194.123.974.100	113%
2017	297.485.382.003	277.400.917.500	107%

*dalam rupiah

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

1. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

Dari hasil perhitungan tabel 9.1 diatas menghasilkan hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 mendapat persentase sebesar 111%. Persentase tersebut jika dilihat dari kriteria yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif karena memiliki perhitungan dengan persentase sebesar 111%.

2. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

Pada tabel 9.1 dapat dilihat tingkat efektifitas yang telah dihitung melalui rumus yang tertera diatas maka di dapatkan

hasil perhitungan untuk tingkat efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 mendapatkan hasil persentase sebesar 127%. Dengan melihat kriteria yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2014 memasuki kategori sangat efektif.

3. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015

Pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara memiliki jumlah realisasi PAD sebesar Rp. 153.482.413.212 dan target PAD sebesar Rp. 133.023.527.100. Dari hasil perhitungan melalui rumus yang dijelaskan diatas mendapatkan nilai persentase sebesar 115%. Nilai persentase tersebut masuk dalam kategori efektif, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015 memasuki kategori sangat efektif dengan nilai persentase 115%.

4. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

Pada tabel 9.1 diatas dapat dilihat pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 memiliki realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 221.048.387.512 dengan target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 194.123.974.100.

Dari hasil perhitungan sesuai rumus didapatkan hasil persentase untuk tingkat efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 sebesar 113%. Dengan melihat kriteria yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan tingkat efektifitas dari pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara memasuki kategori sangat efektif.

5. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 277.400.917.500, namun pada realisasinya mendapatkan sebesar Rp. 297.485.382.003. Dari hasil tersebut dimasukan kedalam rumus yang telah dijelaskan diatas maka mendapatkan hasil persentase untuk tingkat efektifitas pada tahun 2017 sebesar 107%. Dari hasil perhitungan tersebut, tingkat efektifitas pendapatan asli daerah memasuki kategori sangat efektif.